



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR /104 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BISNIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, perlu disusun Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 61);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
24. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BISNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Temanggung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas di Kabupaten Temanggung.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
13. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran UPTD Puskesmas.

14. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
15. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas kepada masyarakat.
16. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standart dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
17. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
18. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
19. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
20. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

BAB I

PENYUSUNAN RENSTRA BISNIS BLUD

Pasal 2

- (1) BLUD menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- (2) BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai prakiraan RBA tahun berikutnya.
- (3) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal, dan estimasi saldo akhir kas BLUD.
- (4) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan :
 - a. basis kinerja dan penghitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. basis akrual.
- (5) BLUD yang telah menyusun Renstra Bisnis BLUD berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya, menggunakan standar biaya tersebut.

- (6) Dalam hal BLUD belum menyusun Renstra Bisnis BLUD berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, BLUD menggunakan standar biaya umum.
- (7) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri :
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - c. penerimaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Rencana Pencapaian Sasaran dan Target Kinerja.
- (2) Pimpinan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Rencana Pencapaian Sasaran dan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan yang sesuai dengan Rencana Pencapaian Sasaran dan Target Kinerja dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Sasaran dan Target Kinerja

Pasal 4

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Sasaran dan Target Kinerja sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENERAPAN

Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Pencapaian Sasaran dan Target Kinerja.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Puskesmas menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Pencapaian Sasaran dan Target Kinerja.

- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Rencana Pencapaian Sasaran dan Target Kinerja.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 6

Pembinaan

- (1) Pembinaan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Sasaran dan Target Kinerja;
 - b. penyusunan Rencana Pencapaian Sasaran dan Target Kinerja; dan
 - c. penilaian dan pelaporan prestasi kerja Rencana Pencapaian Sasaran dan Target Kinerja.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah Pimpinan.

Pasal 8

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen Puskesmas menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan Sasaran, Target Kinerja.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibebankan pada pendapatan operasional Puskesmas yang ditetapkan dalam RBA Puskesmas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **25** Oktober 2017


BUPATI TEMANGGUNG,
Narano
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **25 Oktober 2017**


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR ...~~104~~...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 104 Tahun 2017
TANGGAL : 25 Oktober 2017

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 - 2018

Upaya Pelayanan	Jenis Layanan	Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Rumus Perhitungan	Target					Ket.
				2014	2015	2016	2017	2018	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)	1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
	a. Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	1 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Jumlah persalinan oleh bidan atau Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan dibagi jumlah semua ibu bersalin kali 100%	95%	95%	95%	95%	95%	Renstra Dinkeskab
	b. Semua ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	2 Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar dibagi jumlah ibu hamil yang ada kali 100%				100%	100%	SPM
	2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
	a. Semua ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	3 Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dibagi jumlah semua ibu bersalin kali 100%				100%	100%	SPM
	b. Pelayanan komplikasi kebidanan	4 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani dibagi jumlah semua komplikasi kebidanan kali 100%	87%	87%	90%	90%	90%	Renstra Dinkeskab
	c. Pelayanan nifas	5 Cakupan Pelayanan Nifas	Jumlah pelayanan nifas dibagi jumlah semua ibu bersalin kali 100%	95%	95%	95%	95%	95%	Renstra Dinkeskab
	d. Pelayanan Puskesmas PONED	6 Cakupan Puskesmas PONED aktif	Jumlah Puskesmas PONED Aktif dibagi jumlah semua Puskesmas PONED kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Dinkeskab
	e. Pelayanan Obstetri di Puskesmas PONED	7 Cakupan Pelayanan Obstetri di Puskesmas PONED	Jumlah pelayanan persalinan di Puskesmas PONED dibagi Jumlah semua Ibu Hamil di Puskesmas PONED kali 100%	10%	10%	15%	15%	15%	Renstra Dinkeskab
		8 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu melahirkan dibagi jumlah semua ibu kelahiran hidup kali 100.000	102	101	101	100	100	SDG's
	3 Pelayanan Kesehatan Bayi								
	a. Semua bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah bayi lahir hidup mendapat pelayanan sesuai standar dibagi jumlah semua bayi lahir hidup kali 100%	92,5%	95%	97,5%	100%	100%	SPM
	b. Pelayanan neonatal dengan komplikasi	10 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	Jumlah neonatal dengan komplikasi yang ditangani dibagi jumlah semua neonatal dengan komplikasi kali 100%	65%	65%	65%	65%	65%	Renstra Dinkeskab

Upaya Pelayanan	Jenis Layanan	Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Rumus Perhitungan	Target					Ket.
				2014	2015	2016	2017	2018	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. Pelayanan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah	25 Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah	Jumlah anak balita dan anak pra sekolah yang mendapat pelayanan deteksi dini dibagi jumlah anak balita dan anak pra sekolah kali 100%	95%	95%	95%	100%	100%	SPM
		26 Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian balita dibagi jumlah semua balita kali 1.000	15,2	14,7	14,5	14	13,8	SDG's
	4 Pelayanan Kesehatan Remaja								
	a. Semua warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	27 Cakupan warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah semua warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun kali 100%	80%	80%	80%	100%	100%	SPM
	5 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut								
	a. Pelayanan Posyandu Lansia	28 Cakupan desa dengan posyandu lansia aktif	Jumlah Posyandu Lansia aktif dibagi jumlah semua Posyandu Lansia terdaftar kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Dinkeskab
	b. Semua warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	29 Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah semua warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas kali 100%	80%	80%	80%	100%	100%	SPM
	6 Pelayanan Pencegahan dan pengendalian Penyakit TB Paru	30 Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate)	Jumlah penemuan penderita TBC BTA Positif dibagi jumlah seluruh suspek TB yang diperiksa kali 100%	70%	70%	70%	70%	70%	Renstra Dinkeskab
		31 Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)	Jumlah penderita TB BTA Positif sembuh dari pengobatan dibagi Jumlah semua penderita TB BTA positif kali 100%	>87%	>87%	>87%	>87%	>87%	Renstra Dinkeskab
		32 Cakupan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	Jumlah penderita TB mendapat pelayanan sesuai standar dibagi jumlah semua penderita TB kali 100%				100%	100%	SPM
	7 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian penyakit HIV/AIDS	33 Prevalensi HIV pada Penduduk Usia Dewasa	Jumlah penderita HIV (baru+hama) dibagi jumlah penduduk kali 100%	< 0,05	<0,05	< 0,05	<0,05	< 0,05	SDG's
		34 Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS dibagi semua penduduk usia 15-24 tahun kali 100%	60%	60%	60%	60%	60%	SDG's
		35 Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Jumlah orang berisiko HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar dibagi semua orang yang berisiko HIV kali 100%				100%	100%	SPM

Upaya Pelayanan	Jenis Layanan	Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Rumus Perhitungan	Target					Ket.
				2014	2015	2016	2017	2018	
				6	7	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pneumonia	36 Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	Jumlah penderita pneumonia balita ditemukan dibagi jumlah sasaran penderita pneumonia balita kali 100%	60%	65%	65%	70%	70%	Renstra Dinkeskab
9	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diare	37 Cakupan Penemuan Penderita Diare	Jumlah penderita diare balita ditemukan dibagi jumlah sasaran penderita diare balita kali 100%	90%	90%	90%	90%	90%	Renstra Dinkeskab
		38 Cakupan Penderita diare Yang ditangani	Jumlah penderita diare ditangani sesuai standar dibagi jumlah penderita diare balita kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Dinkeskab
		39 CFR (Angka Kematian Diare)	Jumlah kematian penderita diare balita dibagi jumlah penderita diare balita kali 100%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	Renstra Dinkeskab
10	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria	40 Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk	Jumlah penderita malaria dibagi jumlah penduduk kali 1.000	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	Renstra Dinkeskab
11	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	41 Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 100.000 Penduduk	Jumlah penderita DBD dibagi jumlah penduduk kali 100.000	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	Renstra Dinkeskab
		42 CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue)	Jumlah kematian penderita DBD dibagi jumlah penderita DBD kali 100%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	Renstra Dinkeskab
		43 Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani	Jumlah penderita DBD ditangani sesuai standar dibagi jumlah penderita DBD ditemukan kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Dinkeskab
		44 Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes	Jumlah rumah/bangunan positif jentik nyamuk aedes dibagi jumlah rumah/bangunan diperiksa kali 100%	95%	95%	95%	95%	95%	Renstra Dinkeskab
12	Pelayanan imunisasi	45 Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	Jumlah desa/kelurahan UCI dibagi jumlah semua desa/kelurahan kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Dinkeskab
		46 Cakupan desa/kelurahan Universal Mother Immunisation (UMI)	Jumlah desa/kelurahan UMI dibagi jumlah semua desa/kelurahan kali 100%	80%	80%	80%	80%	80%	Renstra Dinkeskab
		47 Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak	Jumlah anak umur 1 tahun mendapatkan imunisasi campak dibagi jumlah semua anak umur 1 tahun kali 100%	95%	95%	95%	95%	95%	SDG's
		48 Cakupan anak sekolah pada anak SD/ sederajat mendapat pelayanan imunisasi (BIAS)	Jumlah anak SD/ sederajat mendapatkan pelayanan imunisasi DT-TT dan Campak (BIAS) dibagi jumlah sasaran BIAS kali 100%	98%	98%	98%	100%	100%	SPM
13	Pelayanan Penanggulangan KBL/Wabah	49 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam dibagi jumlah desa/kelurahan mengalami KLB kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Dinkeskab
14	Pelayanan kesehatan haji	50 Cakupan pembinaan & pelayanan kesehatan haji sesuai standart	Jumlah jamaah haji mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah jamaah haji kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Dinkeskab

Upaya Pelayanan	Jenis Layanan	Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Rumus Perhitungan	Target					Ket.
				2014	2015	2016	2017	2018	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	51 Cakupan desa melaksanakan Posbindu	Jumlah Posyandu aktif dibagi jumlah semua Posyandu yang terdaftar kali 100%	4,8%	7,3%	9,7%	12,2%	14,5%	Renstra Dinkeskab
		52 Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita hipertensi kali 100%				100,0%	100%	SPM
		53 Cakupan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita Diabetes Melitus kali 100%				100,0%	100%	SPM
		54 Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita ODGJ berat kali 100%				100,0%	100%	SPM
16	Pelayanan Gizi	55 Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan)	Jumlah penderita gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan) dibagi jumlah semua balita kali 100%	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	Renstra Dinkeskab
		56 Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	Jumlah penderita gizi buruk pada anak balita (0-60 bulan) dibagi jumlah semua balita kali 100%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	Renstra Dinkeskab
		57 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Jumlah penderita gizi buruk mendapat perawatan, dibagi jumlah semua penderita gizi buruk ditemukan kali 100%	100	100	100	100	100	Renstra Dinkeskab
		58 Cakupan bayi umur < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Jumlah bayi umur < 6 bulan mendapat ASI eksklusif dibagi jumlah semua bayi lahir hidup umur < 6 bulan kali 100%	80%	80%	80%	80%	80%	Renstra Dinkeskab
		59 Cakupan Balita yang datang dan ditimbang (D/S)	Jumlah balita yang datang dan ditimbang dibagi jumlah semua balita yang ada kali 100%	80%	80%	80%	80%	80%	Renstra Dinkeskab
		60 Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM)	Jumlah balita yang berada di bawah garis merah dibagi jumlah balita yang ada kali 100%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	Renstra Dinkeskab
		61 Cakupan Keluarga Sadar Gizi	Jumlah keluarga yang sadar gizi dibagi jumlah keluarga yang ada kali 100%	80%	80%	80%	80%	80%	Renstra Dinkeskab
		62 Prosentase Kecamatan rawan gizi	Jumlah kecamatan rawan gizi dibagi jumlah kecamatan yang ada kali 100%	80%	80%	80%	80%	80%	Renstra Dinkeskab
		63 Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul Vitamin A 1 kali	Jumlah bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul Vit. A sebanyak 1 kali dalam setahun dibagi jumlah bayi (6-11 bulan) kali 100%	99%	99%	99%	99%	99%	Renstra Dinkeskab
		64 Cakupan balita (12-59 bulan) mendapat kapsul Vitamin A 2 kali	Jumlah balita (12-59 bulan) mendapat kapsul Vit. A sebanyak 2 kali dalam setahun dibagi jumlah balita (12-59 bulan) kali 100%	99%	99%	99%	99%	99%	Renstra Dinkeskab

Upaya Pelayanan	Jenis Layanan	Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Rumus Perhitungan	Target					Ket.	
				2014						
				2014	2015	2016	2017	2018		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		65 Cakupan Ibu Nifas mendapat kapsul Vitamin A	Jumlah ibu nifas mendapat kapsul Vit. A dibagi Jumlah ibu nifas seluruhnya kali 100%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Renstra Dinkeskab
		66 Cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe 90	Jumlah ibu hamil mendapat tablet Fe 90 dibagi jumlah ibu hamil seluruhnya kali 100%	90%	90%	90%	90%	95%	95%	Renstra Dinkeskab
		67 Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Jumlah ibu hamil dengan LILA <23,5 cm dibagi jumlah ibu hamil yang diukur LILA kali 100%				21,2%	19,7%	19,7%	Renstra Dinkeskab
		68 Cakupan RT dengan garam beryodium cukup	Jumlah rumah tangga dengan garam beryodium cukup dibagi jumlah rumah tangga seluruhnya kali 100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Renstra Dinkeskab
	17 Pelayanan Kefarmasian	69 Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	Jumlah obat yang tersedia sesuai kebutuhan dibagi jumlah kebutuhan obat kali 100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Renstra Dinkeskab
		70 Cakupan ketersediaan Napza	Jumlah Napza yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan Napza kali 100%	95%	95%	95%	96%	96%	96%	Renstra Dinkeskab
		71 Cakupan penulisan resep obat generik	Jumlah penulisan resep obat generik dibagi jumlah resep seluruhnya kali 100%	85%	86%	87%	88%	90%	90%	Renstra Dinkeskab
	18 Pelayanan keamanan makanan minuman	72 Cakupan PIRT yang mendapatkan SPP IRT	Jumlah PIRT yang mendapatkan SPP PIRT dibagi jumlah PIRT seluruhnya kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Dinkeskab
		73 Cakupan pengawasan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan di kantin sekolah	Jumlah pengawasan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan di kantin sekolah dibagi jumlah kantin sekolah seluruhnya kali 100%	90%	92%	93%	94%	95%	95%	Renstra Dinkeskab
		74 Cakupan pasar yang mendapat pengawasan makanan minuman	Jumlah pasar yang mendapat pengawasan makanan minuman dibagi jumlah pasar seluruhnya kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Dinkeskab
	19 Pelayanan sanitasi dasar									
	a. Sanitasi dasar	75 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan	Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan dibagi jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan kali 100%	65%	67,5%	70%	72,5%	75%	75%	SDG's
		76 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan	Jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di pedesaan dibagi jumlah rumah tangga seluruhnya di pedesaan kali 100%	65%	67,5%	70%	72,5%	75%	75%	SDG's
	b. Rumah sehat	78 Cakupan rumah sehat	Jumlah rumah sehat dibagi jumlah rumah seluruhnya kali 100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Renstra Dinkeskab
		79 Cakupan rumah yang memiliki SPAL	Jumlah rumah yang memiliki SPAL dibagi jumlah rumah seluruhnya kali 100%	72%	74%	76%	78%	80%	80%	Renstra Dinkeskab

Upaya Pelayanan	Jenis Layanan	Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Rumus Perhitungan	Target						Ket.
				Target						
				2014	2015	2016	2017	2018		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	c. Pemanfaatan jamban	80 Cakupan penduduk yang memanfaatkan jamban	Jumlah penduduk yang memanfaatkan jamban dibagi jumlah penduduk seluruhnya kali 100%	80%	80%	80%	80%	80%	Renstra Dinkeskab	
	d. Air bersih	81 Cakupan desa stop buang air besar sembarangan (ODF)	Jumlah desa ODF dibagi jumlah desa seluruhnya kali 100%	5%	7,5%	10%	12,5%	15%	Renstra Dinkeskab	
		82 Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap air bersih yang layak di perkotaan dibagi jumlah rumah tangga seluruhnya di pedesaan kali 100%	65%	67,5%	70%	72,5%	75%	SDG's	
		81 Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap air bersih yang layak di pedesaan dibagi jumlah rumah tangga seluruhnya di pedesaan kali 100%	50%	53%	55%	58%	60%	SDG's	
	e. Tempat Tempat Umum	82 Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat	Jumlah TTU yang memenuhi syarat dibagi jumlah TTU seluruhnya kali 100%	80%	80%	80%	80%	80%	Renstra Dinkeskab	
	f. Tempat Pengolahan Makanan	83 Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat	Jumlah TPM yang memenuhi syarat dibagi jumlah TPM seluruhnya kali 100%	75%	75%	75%	75%	75%	Renstra Dinkeskab	
	20 Pelayanan UKS	84 Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah anak sekolah dasar seluruhnya kali 100%					100	SPM	
		85 Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan sederajat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih /guru UKS/dokter kecil	Jumlah siswa SD dan sederajat mendapat pemeriksaan kesehatan oleh nakes atau oleh tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil dibagi jumlah siswa TK, SLTP, SLTA kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Dinkeskab	
		86 Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP, SLTA dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih /guru UKS/kader kesehatan sekolah	Jumlah siswa TK, SLTP, SLTA mendapat pemeriksaan kesehatan oleh nakes atau oleh tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil dibagi jumlah siswa TK, SLTP, SLTA kali 100%	80%	80%	80%	100%	100%	SPM	
	21 Pemberdayaan masyarakat	87 Cakupan desa siaga aktif	Jumlah desa siaga aktif dibagi jumlah desa seluruhnya kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Dinkeskab	
		88 Cakupan Posyandu Purnama Dan Mandiri	Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri dibagi jumlah Posyandu seluruhnya kali 100%	42%	44%	46%	48%	50%	Renstra Dinkeskab	
		89 Cakupan rumah tangga sehat	Jumlah rumah tangga sehat dibagi jumlah rumah tangga seluruhnya kali 100%	65%	65%	65%	65%	65%	Renstra Dinkeskab	
	22 Promosi kesehatan	90 Cakupan penyuluhan P3 NAPZA /P3 NARKOBA oleh petugas Kesehatan	Jumlah penyuluhan P3 Napza/P3 Narkoba oleh petugas kesehatan dibagi jumlah penyuluhan seluruhnya kali 100%	30%	30%	30%	30%	30%	Renstra Dinkeskab	
Manajemen Puskesmas	1 Sumber Daya Manusia Kesehatan	91 Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga kesehatan dengan pendidikan sesuai standar dibagi jumlah tenaga kesehatan yang ada kali 100%	70	75	80	80	90	Renstra Dinkeskab	

o	Upaya Pelayanan	Jenis Layanan	Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Rumus Perhitungan	Target					Ket.
					2014	2015	2016	2017	2018	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Perencanaan Puskesmas	92 Tersedianya dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)	Ketersediaan dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas (Renstra, RUK, RPK)	3	3	3	3	3	Renstra Dinkeskab
	3	Monitoring dan pengendalian	93 Cakupan pelaksanaan Loka Karya Mini di Puskesmas	Jumlah pelaksanaan Loka Karya Mini di Puskesmas dibagi jumlah Loka Karya Mini (bulanan dan triwulan) kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Dinkeskab
	4	Penilaian Kinerja	94 Tersedianya dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Ketersediaan dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	1	1	1	1	1	Renstra Dinkeskab
			95 Cakupan mutu pelayanan Puskesmas	Besaran prosentase mutu pelayanan Puskesmas				>90%	>90%	Renstra Dinkeskab
	5	Pengelolaan aset	96 Kelengkapan ASPAK yang tervalidasi Dinas Kesehatan	Prosentase kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan yang tervalidasi Dinas Kesehatan				100	100	Renstra Dinkeskab
	6	Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	97 Cakupan Puskesmas menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Berbasis teknologi informasi	Prosentase penggunaan aplikasi SIK di Puskesmas				100	100	Renstra Dinkeskab

